



Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA UNTUK KERJA SAMA INDO-PASIFIK

**DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN
WACANA PENYELENGGARAAN
KONFERENSI PARLEMEN ASIA AFRIKA KE-2**

Bogor. Jawa Barat. 17 - 19 Mei 2022

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Dasar Hukum
- Maksud dan Tujuan Kegiatan
- Susunan Delegasi
- Persiapan Pelaksanaan Tugas
- Anggaran

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Agenda Kegiatan
- Jalannya Pelaksanaan Kegiatan
- Lain-lain

KESIMPULAN

- Ucapan Terima Kasih
- Keterangan Lampiran
- Kata Penutup



Istana Bogor. Jawa Barat.

**LAPORAN KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA UNTUK KERJA SAMA INDO-PASIFIK
DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN WACANA PENYELENGGARAAN
KONFERENSI PARLEMEN ASIA AFRIKA KE-2
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Bogor - Jawa Barat, 17 - 19 Mei 2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan *Non-Aligned Movement (NAM) Parliamentary Network* atas inisiatif Presiden Republik Azerbaijan, Ilham Aliyev, telah diresmikan di sela-sela Sidang Umum ke-143 *Inter-Parliamentary Union (IPU)* di Madrid - Spanyol pada 28 November 2021. Peresmian Pembentukan Jaringan Parlemen Gerakan Non Blok tersebut sekaligus menyepakati pelaksanaan konferensi pertama di Baku - Azerbaijan pada 30 Juni 2022 - 1 Juli 2022.

Keberadaan *NAM Parliamentary Network* dan penyelenggaraan *Baku Conference* berpotensi menjadi pemantik dihidupkannya kembali gerakan solidaritas Asia-Afrika, mengingat sebagian besar anggota NAM notabene merupakan negara-negara yang berpartisipasi dalam Konferensi Asia Afrika Tahun 1955.

Penguatan kerjasama Selatan-Selatan dalam bingkai Asia Afrika sangat strategis dalam mempertegas posisi Indonesia di tengah kompetisi pengaruh dunia. Dengan kekuatan *voting* yang mencapai lebih dari separuh anggota PBB jika suara kedua benua diakumulasi, dapat membuka kemungkinan diarahkannya kebijakan global untuk memihak kepentingan negara-negara berkembang dan tertinggal. Merangkul Afrika lebih erat sudah sepatutnya menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia.

Di Tahun 2015, ketika Indonesia menjadi tuan rumah peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), DPR RI selaku lembaga negara yang memiliki mandat mendukung pelaksanaan kebijakan politik luar negeri pemerintah, aktif berpartisipasi dengan mengelat *Parliamentary Conference to Commemorate the 60th Anniversary of the Asian African Conference*. Konferensi ini menandai kali pertama lembaga legislatif antar kedua kawasan bertemu dalam satu forum besar dengan berbagi visi yang sama, yaitu meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan di antara negara berkembang.

Peringatan 60 Tahun KAA tersebut menghasilkan Deklarasi "*Asian-African Parliamentary Declaration: Towards stronger partnership for world peace and*

prosperity” dengan sejumlah kesepakatan yang salah satunya adalah pembentukan Grup Parlemen Asia Afrika, di mana Indonesia disetujui menjadi lokasi Sekretariat Tetap kelompok antar parlemen lintas benua tersebut.¹ Namun hingga saat ini, tindak lanjut upaya penguatan kerja sama antar-parlemen Asia-Afrika urung terlaksana.

Sebagai tindak lanjut Konferensi Asia Afrika 2015 sekaligus upaya memperluas fokus kebijakan luar negeri Indonesia ke Afrika, DPR RI berinisiasi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk Jaringan Parlemen Asia-Afrika. Panja ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap implementasi *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP) dengan memperluas kerja sama ke dimensi keparlemenan. Panja untuk Jaringan Parlemen Asia Afrika menjadi pelengkap kerjasama bilateral yang dijalin DPR RI melalui Grup Kerjasama Bilateral (GKSB), dimana hampir 20 GKSB dari total 102 GKSB yang dibentuk BKSP selama periode 2019-2024, ditujukan untuk negara-negara Afrika.

Di samping itu, sesuai ketentuan anggaran DIPA 2023, Panja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik tidak lagi dapat dilanjutkan karena telah berjalan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Oleh karenanya, usulan pembentukan Panja untuk Jaringan Parlemen Asia-Afrika ini akan menggantikan Panja sebelumnya, dengan fokus program kerja yang diarahkan pada penguatan hubungan keparlemenan Asia-Afrika. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat pada tahun 2022, direncanakan untuk diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika yang ke-2. Melalui kegiatan Kunjungan Kerja ini, anggota Panja Kerja Sama Indo-Pasifik berupaya melakukan konsolidasi terhadap usulan pembentuk Panja Jaringan Parlemen Asia-Afrika sekaligus pembahasan terkait kesiapan wacana penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ke-2.

B. Dasar Hukum

1. Surat Tugas Nomor 22/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSR/5/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Perjalanan dinas ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam rangka kegiatan kunjungan kerja mempersiapkan wacana penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ke-2 Tahun 2022.
2. Disposisi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Nomor Agenda 226 tanggal 7 April 2022 perihal Permohonan Izin Kunjungan Kerja BKSAP ke Daerah
3. Surat Ketua BKSAP kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor T/2071/PW.11.02/4/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Permohonan Izin Kegiatan BKSAP ke Daerah

¹ DPR RI, ‘*Asian-African Parliamentary Declaration: Towards stronger partnership for world peace and prosperity,*’ *Parliamentary Conference to Commemorate the 60th Anniversary of the Asian African Conference*, Jakarta, DPR RI, 2015, p. 6, <https://ksap.dpr.go.id/aacc2015/page/detail/id/194> (diakses 23 Mei 2022)

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Kunjungan Kerja Panja untuk Kerjasama Indo-Pasifik ini adalah:

- 1) Menyelaraskan persepsi terkait usulan dibentuknya Panitia Kerja untuk Jaringan Parlemen Asia-Afrika
- 2) Menyerap masukan dari seluruh anggota Panitia Kerja untuk Kerjasama Indo-Pasifik mengenai usulan pembentukan Panja baru
- 3) Membahas rencana program kerja Panitia Kerja untuk Jaringan Parlemen Asia-Afrika untuk jangka waktu pendek, jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang

Adapun **tujuan** dari kegiatan ini adalah:

- 1) Memperdalam pemahaman anggota Panja untuk Kerjasama Kawasan Indo-Pasifik mengenai urgensi penguatan kerjasama jaringan parlemen Asia-Afrika.
- 2) Mengeksplorasi potensi kerja sama yang dapat dibangun antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Afrika
- 3) Membahas persiapan wacana penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ke-2 pada tahun 2022.

D. Susunan Delegasi

Delegasi BKSAP DPR RI yang melaksanakan Kunjungan Kerja pada tanggal 17-19 Mei 2022 di Bogor adalah sebagai berikut:



Putu Supadma Rudana, M.B.A
F-P-Demokrat/A-563
Wakil Ketua BKSAP | Anggota Komisi VI
Wakil Ketua Panitia Kerja



Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A.
F-PDIP/A-139
Anggota BKSAP | Anggota Komisi XI



I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., M.M.
F-PDIP/A-234
Anggota BKSAP | Anggota Komisi XI



Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
F-PDIP/A-239
Anggota BKSAP | Anggota Komisi IV



Krisantus Kurniawan
F-PDIP/A-243
Anggota BKSAP | Anggota Komisi I



H. Singgih Januratmoko, S.KH, M.M.
F-P-Golkar/A-305
Anggota BKSAP | Anggota Komisi VI



Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
F-P-Golkar/A-322
Anggota BKSAP | Anggota Komisi VII



Fadhlullah, S.E.
F-P-Gerindra/A-59
Anggota BKSAP | Anggota Komisi I



Ir. H. Kamrussamad, ST., M.Si.
F-P-Gerindra/A-79
Anggota BKSAP | Anggota Komisi XI



Katherine Anggela Oendoen
F-P-Gerindra/A-123
Anggota BKSAP | Anggota Komisi VII



Arkananta Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc
F-P-Nasdem/A-392
Anggota BKSAP | Anggota Komisi VII



Ratih Megasari Singkaru, M.Sc
F-P-Nasdem/A-402
Anggota BKSAP | Anggota Komisi X



Ina Elisabeth Kobak, S.T., M.M
F-P-Nasdem/A-407
Anggota BKSAP | Anggota Komisi VII



Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si
F-PKB/A-57
Anggota BKSAP | Anggota Komisi X



Drs. Fathan
F-PKB/A-18
Anggota BKSAP | Wakil Ketua Komisi XI



Muslim, S.HI., M.M
F-P-Demokrat/A-523
Anggota BKSAP | Anggota Komisi VI



Linda Megawati, SE., M.Si.
F-P-Demokrat/A-545
Anggota BKSAP | Anggota Komisi IX



H. Syahrul Aidi Ma'azat, Lc., M.A.
F-PKS/A-418
Anggota BKSAP | Anggota Komisi V



Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.
F-PKS/A-438
Anggota BKSAP | Anggota Komisi VIII



Slamet Ariyadi, S.Psi.
F-PAN/A-508
Anggota BKSAP | Anggota Komisi I



Rojih
F-PPP/A-466
Anggota BKSAP | Anggota Komisi X

G. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Sebelum pelaksanaan kegiatan, telah dilakukan persiapan-persiapan teknis dan substansi agar kegiatan berjalan lancar. Persiapan substansi dilakukan dan diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat BKSAP berupa TOR dan Skenario Rapat. Sedangkan persiapan teknis mencakup penyiapan tempat pertemuan, pengajuan anggaran, pengurusan dokumen perjalanan, jadwal keberangkatan dan jadwal acara, dan pembuatan Surat Tugas.

H. Anggaran

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan seluruh kegiatan kunjungan kerja ini adalah Rp. 441.461.000 (Empat ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Agenda Kegiatan

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan, maka kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 - 19 Mei 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

Selasa, 17 Mei 2022

- Keberangkatan Delegasi dari Jakarta ke Bogor
- Konsolidasi Pimpinan Panja terkait materi Rapat dan Penyusunan Rencana Program Kerja

Rabu, 18 Mei 2022

- Penyampaian arahan oleh Ketua Panja
- Diskusi Urgensi pembentukan Panja untuk Jaringan Parlemen Asia-Afrika

Kamis 19 Mei 2022

- Wrap-up Hasil Diskusi
- Kepulangan Delegasi

B. Jalannya Pelaksanaan Kegiatan

a. Situasi Umum Kegiatan

Pertemuan dilaksanakan dalam format Diskusi, sebagai upaya bertukar pandangan terkait usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk Jaringan Parlemen Asia-Afrika. Kegiatan berfokus pada pembahasan eksplorasi potensi kerjasama yang dapat dibangun antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Asia dan Afrika, sebagai sebuah kekuatan baru sejalan dengan diresmikannya *Non Aligned Movement Parliamentary Network*.

Dalam diskusi, sekaligus dibahas rencana pembentukan nama Panja yang baru serta kesiapan dan persiapan Indonesia, khususnya DPR RI dalam wacana penyelenggaraan Konferensi Parlemen Asia-Afrika ke-2. Pertemuan dibuka oleh Wakil Ketua BKSAP/Ketua Desk Kerja Sama Regional, Putu Supadma Rudana, MBA, selaku Ketua Rapat.

b. Pelaksanaan Kegiatan

- **Selasa 17 Mei 2022**

Konsolidasi Pimpinan Panja

Untuk pematangan substansi materi diskusi, dilakukan rapat konsolidasi terlebih dahulu di antara Pimpinan BKSAP yang juga Pimpinan Panja, yaitu

1	Dr. FADLI ZON, SS, M.Sc	Ketua BKSAP/ FP-Gerindra/A-86	Ketua PANJA
2	PUTU SUPADMA RUDANA, M.B.A	Wakil Ketua BKSAP/ Ketua Desk Kerja Sama Regional F-PD/A-563	Wakil Ketua PANJA
3	GILANG DHIELAFARAREZ, SH.,LL.M	Wakil Ketua BKSAP/ F-PDIP/A-179	Wakil Ketua PANJA
4	Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng	Wakil Ketua BKSAP/ F-PKS/A-422	Wakil Ketua PANJA
5	Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR	Wakil Ketua BKSAP/ F-PAN/A-487	Wakil Ketua PANJA

Pematangan materi terutama difokuskan pada penyusunan rencana program Panja baru yang akan dibentuk, yaitu Panja untuk Jaringan Parlemen Asia-Afrika. Salah satu usulan yang menjadi prioritas adalah rencana penyelenggaraan Konferensi Parlemen Asia-Afrika Kedua dalam waktu dekat.

- **Rabu 18 Mei 2022**

1. Penyampaian Arahan oleh Ketua Panja

Dr. Fadli Zon selaku Ketua Panja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik mengawali pertemuan dengan penyampaian perkembangan kinerja Panja selama 3 (tiga) tahun ke belakang (2019-2022). Dr. Fadli Zon mengingatkan kembali kepada seluruh anggota Panja tentang tujuan dibentuknya Panja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik, yaitu sebagai upaya untuk memberikan rekomendasi kepada DPR RI terkait kerjasama, khususnya di bidang ekonomi dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dalam rangka menjaga stabilitas dan perdamaian serta peningkatan kesejahteraan di kawasan. Selain itu ditambahkan pula, keberadaan Panja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik juga ditujukan untuk mendukung keberlangsungan *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) dan keinginan untuk merealisasikan kesepakatan dalam *Chairs' Statement* IPPP Tahun 2018.

Dengan sejumlah program kerja yang telah dirancang di awal pembentukan, yaitu: (1) Kunjungan Kerja ke daerah, khususnya pulau terdepan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau daerah perbatasan dengan negara-negara di kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik; (2) Kunjungan ke negara-negara di kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik; (3) Penyelenggaraan sidang IPPP; dan (4) pelaksanaan *Focus Group Discussion* atau seminar, Panja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik diharapkan dapat menghasilkan *output* berupa rekomendasi dan Laporan Kegiatan Panitia Kerja.



Namun dijelaskan pula oleh Dr. Fadli Zon bahwa pelaksanaan tugas Panja ini selama 3 (tiga) tahun ke belakang tidak dapat sepenuhnya berjalan dengan lancar, terutama pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, akibat adanya pandemi Covid-19. Dan kontinuitas Panja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik tidak dapat dilanjutkan, mengingat ketentuan peraturan DIPA tahun 2023 yang membatasi durasi maksimal pembentukan Panja dengan tugas yang sama.

2. Diskusi Urgensi Pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk Kerja Sama Asia Afrika

Mengingat Ketua Panja ada kegiatan lain yang tidak dapat diwakilkan maka Ketua Rapat mendelegasikan kepada Wakil Ketua BKSAP/Ketua Desk Kerja Sama Regional, Putu Supadma Rudana, MBA, untuk memimpin Diskusi terkait rencana perubahan nama Panja untuk tahun 2023 dan *feasibility* penyelenggaraan Konferensi Parlemen Asia – Afrika ke-2.

Mengawali diskusi, Ketua Rapat menjelaskan bahwa saat ini Parlemen Indonesia menghadapi tantangan baru, dengan diresmikannya *Non Aligned Movement Parliamentary Network*. Konferensi pertama jaringan parlemen negara-negara Non-Blok ini bahkan akan segera diselenggarakan dalam waktu dekat di Azerbaijan pada 30 Juni 2022 - 1 Juli 2022. Hal ini menjadi peluang dan momentum yang baik bagi DPR RI untuk menguatkan kembali hubungan dengan parlemen negara-negara non-blok dalam bingkai kerja sama parlemen Asia Afrika. Kerjasama potensial yang dapat dibangun dengan negara-negara Asia-Afrika dapat menjadi kekuatan baru bagi arah kebijakan politik luar negeri Indonesia, dimana DPR RI dapat berkontribusi dan berpartisipasi aktif sebagai aktor diplomasi jalur kedua melalui kerjasama di area keparlemenan. Usulan pembentukan Panitia Kerja untuk Jaringan Parlemen Asia-Afrika oleh karenanya memiliki urgensi tersendiri, sekaligus sebagai sumbangsih peran BKSAP dalam memberikan rekomendasi bagi DPR secara kelembagaan.

Panja Kerja Sama Asia – Afrika ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada DPR RI terkait kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi untuk kesejahteraan bersama dan menyuarakan kepentingan bersama sesuai Deklarasi Bandung dalam forum internasional. Panja Kerja Sama Asia-Afrika ini juga diharapkan dapat mendukung keberlangsungan *Asia Africa Parliamentary Conference* dan merealisasikan kesepakatan dalam *Asia Africa Declaration* Tahun 2015, serta dapat mendukung realisasi pembentukan *Asia-Pacific Parliamentary Group (APPG)* dan kesekretariatannya di Jakarta.

Rencana program kerja Panja untuk Kerja Sama Asia-Afrika ini telah disusun dan terbuka untuk masukan dari seluruh anggota panja. Beberapa rencana kegiatan panja tersebut yaitu: (1) Kunjungan Kerja ke daerah potensial yang dapat dipromosikan menjadi *sister city / sister province* dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika; (2) kunjungan ke negara-negara Asia dan Afrika; (3) penyelenggaraan Sidang Ke-2 *Asia Africa Parliamentary Conference*; (4) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* atau seminar; dan (5) pembentukan *Asia Pacific Parliamentary Group (APPG)* dan kesekretariatannya di Jakarta.

- **Kamis 19 Mei 2022**
Wrap-up hasil Diskusi

Diskusi yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP/Ketua Desk Kerja Sama Regional, Putu Supadma Rudana, MBA, menghasilkan *wrap-up* hasil diskusi antara lain :

- a. Panja Kerja Sama Indo-Pasifik masih relevan apabila dapat dilanjutkan hingga tahun 2023. Namun apabila DIPA Tahun 2023 diminta mengganti nama Panja maka forum dapat menyetujui perubahan nama Panja Kerja Sama Indo-Pasifik menjadi Panja Kerja Sama Asia-Afrika untuk tahun 2023
- b. Penyelenggaraan Konferensi Parlemen Asia-Afrika ke-2 akan menjadi inisiatif DPR dan perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri agar terjadi sinergi antara politik luar negeri Indonesia di Asia Afrika dengan diplomasi parlemen
- c. Penyelenggaraan Konferensi Parlemen Asia-Afrika ke-2 tidak memungkinkan diselenggarakan pada tahun 2022 karena belum ada persiapan anggarannya dan masih diberlakukannya protocol Kesehatan yang sangat ketat untuk beberapa negara Afrika.
- d. Pada tahun 2023, Indonesia menjadi Presiden AIPA sehingga DPR RI akan menjadi tuan rumah berbagai sidang AIPA pada tahun 2023. Konferensi Parlemen Asia Afrika Ke-2 dapat diselenggarakan pada Juni 2024 bertepatan dengan tanggal Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Pemilu juga telah selesai dilaksanakan.



C. Lain-lain

- **Rapat Koordinasi Internal BKSAP**

Sebelum pelaksanaan Diskusi Panja Kerja Sama Indo-Pasifik, para peserta Rapat terlebih dahulu menghadiri Rapat Koordinasi Internal BKSAP yang dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon, SS, M.Sc dan diselenggarakan di tempat yang sama.



Rapat Koordinasi Internal BKSAP membahas program BKSAP tahun 2022 baik yang telah dilaksanakan maupun yang direncanakan, yaitu :

- a. The 144th General Assembly of Inter-Parliamentary Union di Bali (20 – 24 Maret 2022)

DPR RI telah sukses menyelenggarakan Sidang IPU di Bali yang merupakan pertemuan terbesar para anggota parlemen seluruh dunia yang telah mengukuhkan peran Indonesia, khususnya parlemen dalam upaya mengatasi masalah perubahan iklim yang mengancam masa depan kita bersama. Pertemuan tersebut telah menghasilkan Nusa Dua Deklarasi bertajuk *“Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change”*, yang menegaskan kembali komitmen para anggota parlemen terkait urgensi menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. Pertemuan tersebut juga menegaskan kembali fungsi parlemen, termasuk DPR RI dalam membangun perdamaian melalui multilateralisme, dengan diadopsinya resolusi bertema *“Peaceful resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the charter of the United Nation and territorial integrity”*. Terkait hal ini, Indonesia juga ikut serta dalam *IPU Task Force on the Ukraine/Russia conflict* yang bertujuan mendorong terciptanya dialog antara Parlemen Ukraine dan Rusia. Berbagai pencapaian di atas

dapat terwujud berkat komitmen para Anggota BKSAP dan dukungan jajaran Biro KSAP.

b. Parliamentary 20 (P20) di Jakarta (6 – 7 Oktober 2022)

Indonesia memegang Presidensi G20 pada tahun 2022 dan sebagai mitra pemerintah, Parlemen juga turut serta menyukseskan G20 dengan menjadi tuan rumah persidangan Parliamentary 20 (P20) yang merupakan pertemuan para Ketua Parlemen negara-negara G20. P20 tersebut direncanakan akan diselenggarakan di Gedung Nusantara, Jakarta pada tanggal 6 – 7 Oktober 2022, dan mengundang Ketua Parlemen negara anggota G20, serta beberapa negara undangan lainnya. Tema besar yang akan diangkat adalah “*Stronger Parliament for Sustainable Recovery*”, sesuai dengan tema besar G20 yang menekankan upaya bersama untuk bangkit dan pulih dari pandemi, baik aspek kesehatan maupun ekonomi. Pandemi telah mengajarkan kepada kita semua, keterkaitan antar berbagai aspek, dan parlemen memiliki peran besar untuk mencari solusi bersama pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

c. Pembentukan Panitia Kerja

Di antara kontribusi konkrit BKSAP terkait isu-isu global dan Kawasan dalam kerangka menjaga kepentingan nasional adalah pembentukan Panja SDGs dan Panja Indo-Pasifik. Pada akhir masa tugas Panitia Kerja akan Menyusun Rekomendasi untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi DPR RI terkait dan Pemerintah melalui Kementerian terkait.

Keterlibatan BKSAP dalam pembangunan global sudah sejak ditetapkannya *Millenium Development Goals (MDGs)*. Pada tahun 2010 BKSAP pernah membentuk Panja MDGs. Ketika MDGs bertransformasi ke SDGs/TPB pada tahun 2015, BKSAP pun membentuk Panja SDGs sehingga keterlibatan aktif BKSAP dalam upaya mensukseskan TPB adalah sudah sejak dini. Panja SDGs BKSAP dalam rentang lebih dari satu dekade telah memberikan kontribusi positif untuk merealisasikan TPB di Indonesia melalui ragam agenda dan kegiatan yang dapat ditelaah di berbagai dokumen laporannya. Kini, TPB menghadapi tantangan sangat berat lantaran pandemic dan akibat konflik Rusia-Ukraina. Sementara, batas akhir TPB tersisa sewindu saja yaitu tahun 2030. Dalam konteks inilah terdapat urgensi kontinuitas Panja SDGs sebagai instrumen terdepan di BKSAP dalam mengawal dukungan konkrit DPR terhadap TPB.

Adapun Panja Indo-Pasifik, BKSAP memandang urgensi kesungguhan pemahaman DPR terhadap nilai strategis kawasan Indo-Pasifik terutama terkait penjagaan kedaulatan NKRI dan politik bebas aktif Indonesia yang tidak terjebak ke dalam perangkap polarisasi kekuatan global. Nilai strategis lainnya lagi, kawasan yang merujuk kepada negara-negara yang terletak secara geografis di kawasan Samudera Hindia dan Samudra Pasifik itu, adalah rumah bagi 60 persen populasi dunia dengan total GDP mencapai hampir USD52 triliun dolar AS. Singkatnya, kawasan Indo-Pasifik adalah masa depan dunia. Dari perspektif itulah keberlanjutan Panja Indo-Pasifik layak dipertimbangkan.

- d. Rencana Kegiatan BKSAP dan Kunjungan delegasi DPR RI pada MS V TS 2021-2022, tanggal 17 Mei s.d. 7 Juli 2022. Sidang-Sidang masih diselenggarakan secara virtual seperti Sidang The 13th AIPA Caucus dan Sidang The 5th Meeting of AIPACODD. Negara-negara tujuan belum dapat memberikan persetujuan Kunjungan GKSB dan Kunjungan perorangan dikarenakan pandemi COVID-19



III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Kerja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik pada tanggal 17-19 Mei 2022 dalam rangka mempersiapkan wacana penyelenggaraan Konferensi Parlemen Asia Afrika ke-2 telah terlaksana dengan lancar dan sukses
2. DPR RI perlu merespon peresmian pembentukan *Non Aligned Movement Parliamentary Network* inisiatif dari Parlemen Azerbaijan dan menangkap peluang tersebut melalui penguatan kerjasama dengan parlemen-parlemen Asia-Afrika
3. Diskusi menyepakati pembentukan Panitia Kerja untuk Kerja Sama Asia-Afrika untuk kegiatan tahun 2023 apabila nama Panitia Kerja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik tidak dapat dicantumkan dalam DIPA TA 2023.
4. Diskusi telah menyusun prioritas kegiatan Panja untuk Kerja Sama Asia-Afrika yang perlu direalisasikan dalam waktu dekat, yaitu persiapan penyelenggaraan Konferensi Parlemen Asia Afrika ke-2 dan realisasi kesepakatan *Asia Africa Declaration* tahun 2015 termasuk pembentukan *Asia Pacific Parliamentary Group* dan sekretariatnya di Jakarta.

B. Saran

1. BKSAP DPR RI perlu juga membentuk Panitia Kerja untuk Kerja Sama Asia-Afrika pada tahun 2023 mengingat meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan geopolitik terkini di Kawasan Afrika
2. Dalam melaksanakan program Panitia Kerja untuk Kerja Sama Asia-Afrika, BKSAP DPR RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian terkait agar terjadi sinergi positif antara politik luar negeri Indonesia dengan diplomasi parlemen.
3. BKSAP DPR RI perlu mengkaji *feasibility* dan kesiapan Indonesia dalam menjadi lokasi kesekretariatan APPG.

IV. PENUTUP

a. Ucapan Terima Kasih

BKSAP menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI atas dukungannya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.


b. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi dengan informasi tambahan sebagai lampiran berupa:

- *Term of Reference (TOR)*
- Dokumentasi foto selama kegiatan

Demikian pokok-pokok Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Kerja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik pada tanggal 17-19 Mei 2022 di Bogor, Provinsi Jawa Barat ini disusun dan disampaikan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Delegasi. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2022

a.n Delegasi
Ketua Delegasi

Putu Supadma Rudana, SS, MBA
A-563



DAFTAR LAMPIRAN

TERM OF REFERENCE

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gunung Salak. Jawa Barat.

Term of Reference

Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Kerja Sama Asia Afrika

I. Latar Belakang

Pada 2015, Indonesia menjadi tuan rumah perayaan peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika. Sejumlah kegiatan untuk merayakan hubungan kedua kawasan tersebut berlangsung baik di Jakarta maupun di Bandung.

DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara yang memiliki mandat ikut mendukung pelaksanaan kebijakan politik luar negeri pemerintah, turut berpartisipasi dalam perayaan tersebut melalui perhelatan *Parliamentary Conference to Commemorate the 60th Anniversary of the Asian African Conference*, pada 23 April 2015. Konferensi Parlemen Asia Afrika tersebut menjadi konferensi pertama antar lembaga legislatif kedua kawasan.

Inisiatif diplomasi parlemen dari DPR RI tersebut berpijak pada keyakinan konferensi akan menjadi sarana kerja sama yang mengungkit upaya saling berbagi pengalaman, pengetahuan, teknologi transfer, kerja sama keuangan dan moneter dari negara-negara di kawasan selatan. Ia merupakan pengejawantahan kerja sama Selatan-Selatan yang dilakukan antarnegara berkembang itu sendiri.

Hasil dari konferensi tersebut berupa Deklarasi Konferensi Parlemen Asia Afrika berjudul *Asian – African Parliamentary Declaration : “Towards stronger partnership for world peace and prosperity”*, menyepakati sejumlah hal dengan salah satu yang paling vital adalah kesepakatan membentuk Grup Parlemen Asia Afrika (*Asian African Parliamentary Group/AAPG*) dimana Indonesia disetujui sebagai tempat Sekretariat Tetap.¹ Secara kelembagaan, DPR RI siap menjadi sekretariat tetap kelompok antar-parlemen lintas benua tersebut. Namun, hingga lebih dari 5 tahun berlalu sejak Konferensi Parlemen Asia Afrika pertama tersebut, belum ada tindak lanjut upaya penguatan kerja sama antar-parlemen untuk seluruh Asia Afrika.

Usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Jaringan Parlemen Asia Afrika merupakan bagian tindak lanjut dari Konferensi Parlemen Asia Afrika 2015. Panja ini akan berada di bawah naungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan dalam pelaksanaannya akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan kerja sama di Asia dan Afrika.

¹ DPR RI, 'Asian-African Parliamentary Declaration: Towards Stronger Partnership for World Peace and Prosperity,' *Parliamentary Conference to Commemorate the 60th Anniversary of the Asian African Conference*, Jakarta, DPR RI, 2015, p. 6, <http://ksap.dpr.go.id/aacc2015/page/detail/id/194> (diakses 28 Januari 2021).

II. Urgensi

Pada tanggal 28 November 2021 di tengah-tengah Sidang Umum ke-143 *Inter-Parliamentary Union* (IPU) di Madrid – Spanyol diselenggarakan Upacara Pembukaan untuk pembentukan *Non-Aligned Movement (NAM) Parliamentary Network* atas inisiatif dari Presiden Republik Azerbaijan, Ilham Aliyev, selaku *Chairman of the Non-Aligned Movement (NAM)* periode 2019 - 2023. Konferensi pertama NAM Parliamentary Network akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2022 – 1 Juli 2022 di Baku – Azerbaijan.

Terbentuknya *NAM Parliamentary Network* ini dan terselenggaranya Baku Conference nanti dapat menjadi pemicu untuk menggerakkan kembali solidaritas Asia Afrika karena sebagian besar Anggota Gerakan Non-Blok juga merupakan negara-negara yang hadir pada Konferensi Asia Afrika Tahun 1955.

Upaya memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dalam bingkai Asia Afrika menjadi fundamental untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perebutan pengaruh dunia. Kekuatan voting kedua benua ini mencapai lebih dari separuh anggota PBB dengan Afrika sedikitnya 54 negara dan Asia 48 negara. Apabila dikelola dengan baik, maka, tidak menutup kemungkinan berbagai kebijakan global dapat diarahkan kepada pemihakan negara-negara berkembang dan tertinggal.

Penguatan kerja sama antar kedua benua ini sudah semestinya menjadi bagian fokus kebijakan luar negeri Indonesia. Kerja sama internasional perlu lebih ekspansif untuk memastikan pasar-pasar dan peluang non-tradisional terbuka lebar. Oleh karenanya, Indonesia perlu berperan merangkul Afrika dengan lebih erat.

Ini tak lepas dari prospek Afrika yang, apabila digarap lebih serius, cukup menjanjikan bagi Indonesia. Sejumlah negara di Asia seperti Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan telah lebih dahulu melirik Afrika dan menjejakkan kaki serta pengaruhnya di Afrika sejak dekade silam. Melalui inisiatif Belt and Road, Tiongkok juga telah membenamkan sedikitnya \$ 1 miliar untuk *Belt and Road Africa Fund*.²

Afrika merupakan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua setelah Asia, menurut *International Monetary Fund (IMF)*. McKinsey menerangkan konsumsi rumah tangga Afrika tumbuh rata-rata 3.8 persen per tahun dan diprediksi mencapai \$ 2.1 triliun pada 2025. Pada 2025, populasi penduduk diperkirakan tumbuh 20% dengan 40% total penduduk adalah kaum muda. Diperkirakan 190 juta masyarakat Afrika akan tinggal di kawasan perkotaan, yang berarti 45% penduduk terurbanisasi

² Silk Road Briefing, 'US\$ 1 Billion Belt and Road Africa Fund launched,' *silk road briefing*, Dezan Shira and Associates, 2019, <https://www.silkroadbriefing.com/news/2019/07/04/us-1-billion-belt-road-africa-fund-launched/> (diakses 28 Januari 2021).

pada 2025. Analisis McKinsey juga memperkirakan *e-commerce* akan berkontribusi 10% dari total perdagangan retail di negara-negara besar Afrika.³

Selain itu Afrika juga kaya akan kandungan mineral. Sekitar hampir separuh stok mineral mangan berasal dari Afrika. Dua dari lima besar negara dengan kandungan mangan berasal dari Afrika (Afrika Selatan dan Gabon). Produksi mangan Afrika Selatan mencapai 6.2 juta ton atau 33% dunia dengan perkiraan 70% cadangan global ada di negara tersebut. Mangan adalah bahan esensial dalam pengolahan baja serta baterai berkapasitas tinggi.⁴

Afrika juga menjadi sumber mineral untuk kebutuhan masa depan, khususnya dalam dunia yang serba digital. Republik Demokratik Kongo merupakan produsen 70% kobalt dunia pada 2019 dengan total 100,000 ton. Kobalt adalah bahan dasar baterai kendaraan elektrik atau baterai lithium-ion. Diperkirakan ada 7 juta ton cadangan kobalt terukur di dunia dan separuh di antaranya di Afrika.⁵

Pembentukan Panja Parlemen Asia Afrika menjadi upaya kunci untuk memperluas fokus kebijakan luar negeri Indonesia ke negara Afrika. DPR RI bergerak menggunakan Asia Afrika sebagai kerangka kerja untuk membingkai semangat 1955 dalam energi baru penguatan kerja sama Indonesia – Afrika.

Panja Parlemen Asia Afrika selain tindak lanjut dari Deklarasi Parlemen Asia Afrika 2015, juga merupakan implementasi nyata New Asian African Strategic Partnership (NAASP). Panja mendukung NAASP dengan memperluas kerja sama ke aspek dimensi keparlemenan.

Panja menjadi pelengkap kerja sama bilateral yang dilakukan DPR melalui GKSB. Dari sekitar 102 GKSB yang dibentuk BKSAP pada 2019-2024, kurang dari 20 grup di antaranya ditujukan untuk negara-negara di Afrika. Sementara itu ada pula negara di Afrika seperti Djibouti telah menyatakan diri ingin mempererat hubungan antarparlemen dengan DPR RI.

III. Tujuan dan Manfaat

Pembentukan Panja Parlemen Asia Afrika merupakan tindak lanjut krusial dari Deklarasi Parlemen Asia Afrika 2015. Dengan cakupan masa kerja yang terbatas pada dua kali masa sidang, tugas Panja dapat fokus pada sejumlah tujuan sebagai berikut:

³ Damian Hattingh, et al, 'Lions (still) on the Move: Growth in Africa's consumer sector,' *McKinsey and Company*, 2017, <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/lions-still-on-the-move-growth-in-africas-consumer-sector> (diakses 28 Januari 2021).

⁴ NS Energy Staff Writer, 'Top Five Manganese Ore Mining Countries Across the Globe,' *NSEnergybusiness*, NS Energy, 2020, <https://www.nsenerybusiness.com/features/manganese-producing-countries/> (diakses 28 Januari 2021).

⁵ US Geological Survey, 'Cobalt, Mineral Commodity Summaries,' *USGS*, USGS Publication Warehouse, 2020, <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-cobalt.pdf> (diakses 28 Januari 2021).

1. Menjadi katalis penguatan kerja sama antarpemerintah negara-negara Asia dan Afrika;
2. Mempersiapkan kajian pembentukan *Asian African Parliamentary Group (AAPG)* beserta sekretariat permanennya;
3. Membangun pusat data Afrika dalam berbagai segi baik dari sisi politik, bisnis, potensi mineral, peluang kerja sama dan lainnya.

Dari tujuan-tujuan tersebut, DPR RI akan mendapatkan sejumlah manfaat dari pembentukan Panja, yakni:

1. DPR dapat membantu Pemerintah dalam memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan Afrika. Meskipun sejumlah negara Asia telah lebih dahulu memfokuskan ekspansi di Afrika, Indonesia masih tetap memiliki peluang untuk meningkatkan kerja sama dan memperluas pengaruh di negara-negara Afrika.
2. Pembentukan AAPG beserta Sekretariat Permanennya, dapat meningkatkan peran diplomasi parlemen DPR dalam menjadi *role model* pengembangan demokrasi di kawasan Asia dan Afrika, sekaligus menjadi parlemen yang pertama kali memfokuskan kerja diplomasi menggandeng parlemen-parlemen di kawasan Afrika. Kendati demikian, perlu mekanisme memadai untuk membangun rasa kepemilikan AAPG dari parlemen negara-negara Afrika.
3. Melengkapi upaya pemerintah memetakan informasi dan data mengenai potensi Afrika termasuk dengan memberikan informasi relevan dari sisi dimensi keparlemenan (baik situasi politik, perkembangan legislasi dan lainnya). Dengan data dan informasi memadai, pemangku kepentingan di Indonesia bisnis/pemerintah dapat bertindak terukur dalam mencari peluang-peluang non-tradisional di Afrika.

IV. Rencana Program Kerja

- **Focus Group Discussion (FGD)** dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, untuk pemetaan prospek-prospek yang tengah dikembangkan oleh pemerintah di negara-negara Afrika.
- **FGD** dengan Kemlu, Museum Asia Afrika, dan Perguruan Tinggi (Pusat Kajian Asia Afrika UNPAD/Pusat Kajian Strategik Indonesia Afrika UI/Pusat Studi Kajian Afrika UNAIR/pusat-pusat lainnya) untuk mendapatkan perspektif historis dan kontekstual terkait kerja sama Asia Afrika. (virtual ataupun kunjungan daerah).

- **Kunjungan Kerja Luar Negeri**⁶ ke negara di Afrika dengan prioritas: negara mitra dagang terbesar dengan Indonesia/negara lokasi kantor Indonesian Trade Promotion Center (Nigeria dan Afrika Selatan), negara markas Uni Afrika (Ethiopia) ataupun markas Pan African Parliament (Midrand, Afrika Selatan), untuk memetakan potensi ekonomi Afrika secara lebih detail termasuk dalam bingkai African Continental Free Trade Area (ACFTA).⁷ Kunjungan juga dapat dilakukan ke negara-negara berpengaruh di Uni Afrika (dari sisi komposisi pembiayaan organisasi, maupun komposisi negara dengan jabatan terbanyak di Uni Afrika).
- **Kunjungan Kerja Luar Negeri** ke negara di Asia seperti: Tiongkok, Korsel atau Jepang untuk mendapatkan *insight* prioritas dan fokus kebijakan negara terkait di Afrika dan dukungan pembentukan AAPG. Kunjungan ke negara-negara Asia pelopor Konferensi Asia Afrika juga relevan untuk meningkatkan *awareness* kekuatan Asia Afrika.
- **Penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan dokumen data/buku (virtual maupun cetak)** mengenai potensi dan peluang negara-negara Afrika pada akhir masa kerja.

V. PENUTUP

Demikian disampaikan Kerangka Acuan untuk Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Kerja Sama Asia Afrika dengan mempertimbangkan bahwa Panja Kerja Sama Indo-Pasifik telah dilaksanakan secara tiga (3) tahun berturut-turut sehingga perlu mengganti fokus kajian ke kawasan lainnya yang juga merupakan fokus utama politik luar negeri Indonesia.

⁶ Kunjungan Kerja ke Luar Negeri tetap dengan mempertimbangkan situasi kedaruratan global terkait pandemi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan memadai. Dalam situasi kunjungan ke LN tidak dapat dilakukan, diskusi virtual dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan waktu.

⁷ Afrika secara garis besar memiliki dua kawasan: kawasan sub sahara yang merupakan negara-negara yang berada di sisi selatan dan berbatasan dengan keseluruhan atau sebagian Gurun Sahara. Ada 46 negara dalam kawasan ini. Kawasan lainnya adalah Afrika Utara yang terdiri dari sedikitnya 6 negara.

DOKUMENTASI KEGIATAN











**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek MPR/ DPR/ DPD RI
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Telp. : 021-5715842

Faks. : 021-5752132

Email : ksr.bksapdpr@gmail.com | opr.bksap@yahoo.com



@bksapdpr



@bksapdpri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>